



Evaluasi Kebijakan Lingkungan untuk Menilai Dampak Kebijakan terhadap Kelestarian Lingkungan

Marchelia indriyani^{1*}, Dwi Handayani², Herlina Herlina³

¹⁻³ Program studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Maritim Raja Ali Haji

Email: marcheliaindriyani106@gmail.com^{1*}, Dwih5035@gmail.com², Na9212732@gmail.com³

Abstract. Environmental crises such as climate change, ecosystem degradation, and pollution have prompted countries to formulate environmental policies aimed at preserving environmental sustainability. However, the effectiveness of these policies is often questioned, particularly in their implementation. This article aims to evaluate the impacts of environmental policies implemented over the past decade on biodiversity, air quality, and waste management, as well as to identify implementation barriers and provide recommendations for policy improvement. The study employs a literature review method by analyzing various scientific sources, policy reports, and related documents. The evaluation results indicate that economic incentive-based policies, such as carbon taxes and renewable energy subsidies, tend to be more effective in reducing emissions and promoting clean energy adoption. Nevertheless, policy implementation frequently faces obstacles including lack of political support, limited resources, public resistance, and weak inter-sectoral coordination. Improvement strategies are needed, including enhanced cross-sector collaboration, strengthened data and information systems, and public education to support the success of sustainable environmental policies.

Keywords: environmental policy, policy evaluation, environmental sustainability

Abstrak. Krisis lingkungan seperti perubahan iklim, degradasi ekosistem, dan pencemaran telah mendorong negara-negara untuk merumuskan kebijakan lingkungan yang bertujuan menjaga kelestarian lingkungan. Namun, efektivitas kebijakan tersebut masih sering dipertanyakan, terutama dalam implementasinya. Artikel ini bertujuan untuk mengevaluasi dampak kebijakan lingkungan yang diterapkan dalam sepuluh tahun terakhir terhadap keanekaragaman hayati, kualitas udara, dan pengelolaan limbah, serta mengidentifikasi hambatan implementasi dan memberikan rekomendasi perbaikan kebijakan di masa depan. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur dengan menganalisis berbagai sumber ilmiah, laporan kebijakan, dan dokumen terkait. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa kebijakan berbasis insentif ekonomi, seperti pajak karbon dan subsidi energi terbarukan, cenderung lebih efektif dalam menurunkan emisi dan meningkatkan adopsi energi bersih. Namun, implementasi kebijakan sering terkendala oleh kurangnya dukungan politik, keterbatasan sumber daya, resistensi masyarakat, serta koordinasi antarsektor yang lemah. Diperlukan strategi perbaikan, termasuk peningkatan kolaborasi lintas sektor, penguatan data dan informasi, serta edukasi publik untuk mendukung keberhasilan kebijakan lingkungan yang berkelanjutan.

Kata Kunci: kebijakan lingkungan, evaluasi kebijakan, kelestarian lingkungan

1. PENDAHULUAN

Dalam beberapa dekade terakhir, krisis lingkungan telah menjadi salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh umat manusia. Perubahan iklim, degradasi ekosistem, dan pencemaran lingkungan tidak hanya mengancam keberlanjutan kehidupan manusia tetapi juga ekosistem yang lebih luas. Krisis ini telah mendorong berbagai negara untuk merumuskan dan menerapkan kebijakan lingkungan yang bertujuan untuk mengurangi dampak negatif dari

aktivitas manusia terhadap lingkungan. Namun, efektivitas dari kebijakan-kebijakan ini sering kali dipertanyakan, terutama dalam hal dampaknya terhadap kelestarian lingkungan.

Krisis lingkungan global dan lokal telah menjadi perhatian utama di berbagai negara. Isu-isu seperti perubahan iklim, degradasi ekosistem, dan pencemaran lingkungan telah menjadi ancaman serius bagi keberlanjutan kehidupan manusia dan ekosistem. Perubahan iklim, misalnya, telah menyebabkan peningkatan suhu global, perubahan pola cuaca, dan peningkatan frekuensi bencana alam seperti banjir dan kekeringan. Degradasi ekosistem, di sisi lain, telah mengurangi keanekaragaman hayati dan merusak keseimbangan alami ekosistem. Pencemaran lingkungan, baik dari limbah industri maupun domestik, telah mencemari udara, air, dan tanah, yang pada gilirannya mempengaruhi kesehatan manusia dan ekosistem.

Dalam konteks ini, berbagai kebijakan lingkungan telah dirumuskan untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Kebijakan-kebijakan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari pengurangan emisi gas rumah kaca, konservasi keanekaragaman hayati, pengelolaan limbah, hingga peningkatan kualitas udara. Namun, implementasi kebijakan lingkungan sering kali menghadapi berbagai hambatan, seperti kurangnya dukungan politik, sumber daya yang terbatas, atau resistensi masyarakat. Hambatan-hambatan ini dapat mengurangi dampak positif kebijakan terhadap kelestarian lingkungan.

Implementasi kebijakan lingkungan sering kali menghadapi berbagai hambatan yang dapat mengurangi efektivitasnya. Beberapa hambatan utama yang sering dihadapi meliputi:

1. Kurangnya Dukungan Politik, Kebijakan lingkungan sering kali tidak mendapatkan dukungan politik yang cukup dari pemerintah dan legislatif. Hal ini dapat disebabkan oleh prioritas yang berbeda atau kepentingan ekonomi yang bertentangan dengan tujuan lingkungan.
2. Sumber Daya yang Terbatas, Implementasi kebijakan lingkungan memerlukan sumber daya yang signifikan, baik dalam hal keuangan, teknologi, maupun tenaga kerja. Keterbatasan sumber daya ini dapat menghambat pelaksanaan kebijakan yang efektif.
3. Resistensi Masyarakat, Beberapa kebijakan lingkungan mungkin tidak diterima dengan baik oleh masyarakat, terutama jika kebijakan tersebut dianggap mengganggu kehidupan sehari-hari atau mengurangi kesejahteraan ekonomi.
4. Kurangnya Koordinasi Antar Sektor, Kebijakan lingkungan sering kali memerlukan koordinasi yang baik antara berbagai sektor, seperti pemerintah pusat dan daerah, sektor swasta, dan masyarakat sipil. Kurangnya koordinasi ini dapat mengurangi efektivitas kebijakan.

5. Keterbatasan Data dan Informasi, Kebijakan lingkungan yang efektif memerlukan data dan informasi yang akurat dan terkini. Keterbatasan data ini dapat menghambat pengambilan keputusan yang tepat.

Artikel ini bertujuan untuk mengevaluasi dampak kebijakan lingkungan terhadap kelestarian lingkungan, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan kebijakan di masa depan. Tujuan spesifik dari artikel ini meliputi

- Mengevaluasi Dampak Kebijakan Lingkungan Menganalisis dampak kebijakan lingkungan yang diterapkan dalam 10 tahun terakhir terhadap keanekaragaman hayati, kualitas udara, dan pengelolaan limbah.
- Mengidentifikasi Hambatan Implementasi, Mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam implementasi kebijakan lingkungan dan bagaimana hambatan tersebut mempengaruhi efektivitas kebijakan.
- Memberikan Rekomendasi Perbaikan, Memberikan rekomendasi untuk perbaikan kebijakan lingkungan di masa depan, termasuk strategi untuk mengatasi hambatan-hambatan yang ada.

Evaluasi ini mencakup kebijakan lingkungan yang diterapkan dalam 10 tahun terakhir di berbagai negara. Fokus evaluasi adalah pada tiga aspek utama:

1. Keanekaragaman Hayati: Menganalisis dampak kebijakan lingkungan terhadap konservasi dan restorasi keanekaragaman hayati. Ini termasuk kebijakan yang bertujuan untuk melindungi spesies terancam punah, restorasi habitat, dan pengelolaan kawasan konservasi.
2. Kualitas Udara: Menganalisis dampak kebijakan lingkungan terhadap kualitas udara. Ini termasuk kebijakan yang bertujuan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca, polusi udara dari industri dan transportasi, serta promosi energi bersih dan terbarukan.
3. Pengelolaan Limbah: Menganalisis dampak kebijakan lingkungan terhadap pengelolaan limbah. Ini termasuk kebijakan yang bertujuan untuk mengurangi produksi limbah, promosi daur ulang, dan pengelolaan limbah yang aman dan berkelanjutan.

Evaluasi ini juga akan mempertimbangkan berbagai faktor yang mempengaruhi efektivitas kebijakan, seperti dukungan politik, sumber daya yang tersedia, resistensi masyarakat, koordinasi antar sektor, dan ketersediaan data dan informasi. Dengan demikian, artikel ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang komprehensif tentang dampak kebijakan lingkungan terhadap kelestarian lingkungan dan memberikan rekomendasi yang relevan untuk perbaikan kebijakan di masa depan.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Evaluasi kebijakan lingkungan didasarkan pada beberapa teori utama yang saling melengkapi, yaitu teori kebijakan publik, ekologi, dan ekonomi lingkungan. Teori kebijakan publik memberikan kerangka kerja untuk menganalisis proses pembuatan, implementasi, dan evaluasi kebijakan. Teori ini membantu memahami bagaimana kebijakan dirumuskan, bagaimana implementasi dilakukan, dan bagaimana efektivitas kebijakan dievaluasi. Sementara itu, teori ekologi memberikan kerangka untuk menilai dampak kebijakan terhadap keanekaragaman hayati dan fungsi ekosistem. Teori ini membantu memahami bagaimana kebijakan lingkungan mempengaruhi spesies, habitat, dan keseimbangan ekosistem.

Ekonomi lingkungan, di sisi lain, memberikan kerangka untuk menilai dampak kebijakan lingkungan dari perspektif ekonomi. Teori ini membantu memahami bagaimana kebijakan lingkungan dapat mempengaruhi pasar, harga, dan insentif ekonomi. Misalnya, kebijakan yang memberikan insentif ekonomi seperti pajak karbon atau subsidi energi terbarukan dapat mendorong perubahan perilaku yang lebih ramah lingkungan.

Penelitian sebelumnya telah memberikan banyak wawasan tentang efektivitas berbagai pendekatan dalam kebijakan lingkungan. Misalnya, penelitian menunjukkan bahwa kebijakan lingkungan yang berbasis insentif ekonomi, seperti pajak karbon atau subsidi energi terbarukan, cenderung lebih efektif dibandingkan pendekatan regulasi konvensional. Insentif ekonomi dapat memberikan dorongan finansial yang memotivasi individu dan perusahaan untuk mengadopsi praktik yang lebih ramah lingkungan.

Namun, keberhasilan kebijakan lingkungan tidak hanya bergantung pada desain kebijakan itu sendiri, tetapi juga pada dukungan masyarakat dan kapasitas institusi. Misalnya, penelitian oleh Santosa (2024) menunjukkan bahwa kebijakan pengendalian plastik di Kota Semarang masih menghadapi tantangan implementasi akibat kurangnya pengawasan yang merata dan sanksi yang tegas. Penelitian ini menyoroti pentingnya pengawasan yang ketat dan sanksi yang tegas untuk memastikan kepatuhan terhadap kebijakan lingkungan. (santosa, n.d.)

Selain itu, studi Butarbutar et al. (2024) mengungkapkan bahwa kolaborasi antar-pemangku kepentingan sangat penting dalam mengelola dampak pariwisata terhadap kesehatan lingkungan. Penelitian ini menekankan pentingnya keterlibatan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil, dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan lingkungan yang efektif. (Butarbutar et al., 2024)

Kerangka evaluasi yang digunakan dalam penelitian ini meliputi beberapa metode utama untuk menilai dampak kebijakan lingkungan. Pertama, analisis dampak lingkungan

(Environmental Impact Assessment) digunakan untuk menilai dampak kebijakan terhadap lingkungan fisik dan biologis. Metode ini membantu mengidentifikasi dan mengukur perubahan yang terjadi pada ekosistem akibat kebijakan lingkungan.

Kedua, analisis keberlanjutan (Sustainability Assessment) digunakan untuk menilai apakah kebijakan lingkungan dapat dipertahankan dalam jangka panjang. Metode ini mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan untuk memastikan bahwa kebijakan tidak hanya efektif dalam jangka pendek tetapi juga berkelanjutan dalam jangka panjang. Selain itu, penelitian ini juga mengadopsi kerangka evaluasi kebijakan publik berdasarkan pendekatan William N. Dunn, yang mencakup beberapa indikator utama untuk mengevaluasi kebijakan publik. Indikator-indikator ini meliputi:

1. Efektivitas: Sejauh mana kebijakan mencapai tujuan yang diinginkan.
2. Efisiensi: Seberapa baik kebijakan menggunakan sumber daya yang tersedia untuk mencapai tujuan.
3. Kecukupan: Sejauh mana kebijakan memenuhi kebutuhan yang ada.
4. Pemerataan: Sejauh mana kebijakan memberikan manfaat yang adil kepada semua kelompok masyarakat.
5. Responsivitas: Sejauh mana kebijakan merespons kebutuhan dan aspirasi masyarakat.
6. Ketepatan: Sejauh mana kebijakan sesuai dengan konteks dan kondisi lokal.

Dengan menggunakan kerangka evaluasi ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang komprehensif tentang efektivitas kebijakan lingkungan yang diterapkan dalam 10 tahun terakhir, serta memberikan rekomendasi yang relevan untuk perbaikan kebijakan di masa depan.

3. METODE PENELITIAN

Studi literatur sebagai pendekatan untuk evaluasi kebijakan lingkungan dimulai dengan identifikasi tema dan fokus penelitian, yang berfokus pada dampak kebijakan terhadap kelestarian lingkungan. Penelitian ini mencakup analisis mendalam tentang kebijakan-kebijakan yang diterapkan untuk mengatasi isu lingkungan serta upaya-upaya yang dilakukan untuk memperbaiki dampak lingkungan melalui kebijakan tersebut. Setelah fokus penelitian ditetapkan, peneliti melakukan pencarian literatur yang relevan melalui berbagai sumber informasi, seperti jurnal ilmiah, buku, laporan kebijakan, dan dokumen penelitian terkait. Sumber informasi ini mencakup studi empiris, teori kebijakan, model evaluasi kebijakan, serta panduan praktis mengenai dampak kebijakan lingkungan terhadap ekosistem dan kelestarian

lingkungan. Selanjutnya, peneliti memilih sumber-sumber informasi yang paling relevan dan berkualitas tinggi sesuai dengan tujuan penelitian, dengan kriteria seleksi yang meliputi kesesuaian topik, kredibilitas data, metodologi yang digunakan, serta reputasi penulis atau lembaga yang melakukan penelitian. Setelah seleksi, peneliti mengevaluasi setiap sumber yang terpilih untuk memastikan kualitas, keandalan, dan relevansi informasi, termasuk penilaian terhadap metodologi, analisis data, serta interpretasi hasil dari kebijakan yang dianalisis. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dan disintesis untuk menghasilkan pemahaman yang lebih menyeluruh tentang dampak kebijakan lingkungan terhadap kelestarian lingkungan, menggunakan pendekatan analisis deskriptif, komparatif, dan interpretatif untuk mengidentifikasi pola-pola utama dan tren kebijakan.

Hasil dari analisis dan sintesis data disajikan dalam bentuk narasi yang terstruktur dengan baik, diorganisir berdasarkan tema-tema dan subtema yang relevan, serta menyajikan temuan utama yang mendukung atau berlawanan dengan hipotesis penelitian. Interpretasi hasil dilakukan dengan mengaitkan temuan tersebut dengan teori kebijakan yang ada, memberikan wawasan lebih mendalam mengenai keberhasilan kebijakan terhadap kelestarian lingkungan. Penelitian ini ditutup dengan kesimpulan yang merangkum temuan-temuan utama serta memberikan rekomendasi kebijakan yang berbasis pada hasil analisis literatur yang telah dilakukan, bertujuan untuk meningkatkan efektivitas kebijakan lingkungan di masa depan dengan mempertimbangkan kondisi lokal dan kemampuan institusi yang terlibat dalam implementasi kebijakan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa kebijakan lingkungan yang diterapkan dalam 10 tahun terakhir memiliki dampak yang beragam terhadap kelestarian lingkungan. Dampak ini dapat dibagi menjadi dua kategori utama: dampak positif dan dampak negatif.

a) Dampak Positif

Kebijakan pajak karbon yang diterapkan di beberapa negara telah berhasil mengurangi emisi gas rumah kaca hingga 20% dalam lima tahun. Kebijakan ini memberikan insentif ekonomi bagi perusahaan dan individu untuk mengurangi emisi mereka dengan mengenakan biaya pada emisi karbon yang dihasilkan. Contoh sukses dari kebijakan ini dapat dilihat di Swedia, di mana pajak karbon yang diterapkan sejak tahun 1991 telah mengurangi emisi karbon sebesar 26% tanpa menghambat pertumbuhan ekonomi. Selain itu, kebijakan subsidi untuk energi terbarukan juga menunjukkan dampak positif. Subsidi ini mendorong

pengembangan dan adopsi teknologi energi bersih seperti tenaga surya dan angin. Di Jerman, misalnya, subsidi untuk energi terbarukan telah meningkatkan kapasitas energi terbarukan hingga 40% dari total konsumsi energi di negara tersebut.

b) Dampak Negatif

Implementasi kebijakan larangan penggunaan plastik sekali pakai menghadapi tantangan signifikan, terutama karena kurangnya alternatif yang terjangkau. Meskipun kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi limbah plastik, banyak konsumen dan bisnis mengalami kesulitan dalam menemukan alternatif yang murah dan efektif. Di beberapa negara berkembang, kebijakan ini bahkan dapat meningkatkan biaya produksi dan konsumsi, karena alternatif yang tersedia sering kali lebih mahal dan kurang mudah diakses.

Selain itu, kebijakan pengelolaan limbah yang tidak didukung oleh infrastruktur yang memadai juga menunjukkan dampak negatif. Di beberapa kota besar di Indonesia, misalnya, kebijakan pengelolaan limbah masih menghadapi masalah serius, seperti kurangnya fasilitas daur ulang dan pengolahan limbah yang efektif. Hal ini menghambat upaya untuk mengelola limbah secara berkelanjutan dan dapat mengakibatkan dampak lingkungan yang lebih besar.

Temuan ini mengindikasikan bahwa keberhasilan kebijakan lingkungan sangat bergantung pada desain kebijakan dan konteks lokal. Beberapa faktor penentu keberhasilan kebijakan lingkungan meliputi:

- **Dukungan Masyarakat:** Kebijakan yang didukung oleh masyarakat cenderung lebih efektif. Misalnya, kebijakan pajak karbon yang diterapkan di Swedia berhasil karena adanya dukungan publik yang kuat.
- **Insentif Ekonomi:** Kebijakan yang memberikan insentif ekonomi, seperti pajak karbon dan subsidi energi terbarukan, cenderung lebih efektif dibandingkan regulasi yang ketat tetapi tidak fleksibel. Insentif ekonomi memberikan dorongan finansial yang memotivasi individu dan perusahaan untuk mengadopsi praktik yang lebih ramah lingkungan.
- **Kapasitas Kelembagaan:** Kapasitas kelembagaan yang kuat, termasuk infrastruktur yang memadai dan kemampuan untuk menegakkan regulasi, juga menjadi faktor penentu keberhasilan. Kebijakan yang didukung oleh kapasitas kelembagaan yang kuat cenderung lebih efektif dalam mencapai tujuan lingkungan.

c) Perbandingan dengan Studi Sebelumnya

Temuan ini konsisten dengan penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa kebijakan berbasis insentif lebih efektif dibandingkan regulasi yang ketat tetapi tidak fleksibel. Misalnya, studi oleh Santosa (2024) menunjukkan bahwa kebijakan pengendalian plastik di Kota Semarang masih menghadapi tantangan implementasi akibat kurangnya pengawasan yang merata dan sanksi yang tegas. Studi ini menekankan pentingnya insentif ekonomi dan pengawasan yang ketat untuk memastikan kepatuhan terhadap kebijakan lingkungan.

Selain itu, studi Butarbutar et al. (2024) mengungkapkan bahwa kolaborasi antar-pemangku kepentingan sangat penting dalam mengelola dampak pariwisata terhadap kesehatan lingkungan. Penelitian ini menambahkan wawasan tentang pentingnya adaptasi kebijakan terhadap kondisi lokal dan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan lingkungan yang efektif.

Hasil evaluasi ini memberikan masukan penting bagi pembuat kebijakan untuk meningkatkan efektivitas kebijakan lingkungan.

Beberapa rekomendasi yang dapat diambil meliputi:

- a) Memperkuat Kapasitas Institusi: Pembuat kebijakan perlu memperkuat kapasitas kelembagaan dengan meningkatkan infrastruktur dan kemampuan untuk menegakkan regulasi. Ini termasuk investasi dalam fasilitas daur ulang, pengolahan limbah, dan pengawasan yang ketat.
- b) Memberikan Insentif Ekonomi: Pembuat kebijakan perlu memberikan insentif ekonomi yang memadai untuk mendorong perubahan perilaku yang lebih ramah lingkungan. Ini dapat berupa pajak karbon, subsidi energi terbarukan, atau insentif lainnya yang mendorong adopsi teknologi bersih.
- c) Melibatkan Masyarakat dalam Proses Pengambilan Keputusan: Pembuat kebijakan perlu melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan untuk memastikan bahwa kebijakan yang dirumuskan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Partisipasi masyarakat dapat meningkatkan dukungan dan kepatuhan terhadap kebijakan lingkungan.
- d) Adaptasi Kebijakan terhadap Kondisi Lokal: Pembuat kebijakan perlu menyesuaikan kebijakan lingkungan dengan kondisi lokal untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut efektif dan berkelanjutan. Ini termasuk mempertimbangkan faktor sosial, ekonomi, dan budaya yang mempengaruhi implementasi kebijakan.

Dengan mengadopsi rekomendasi ini, diharapkan kebijakan lingkungan yang diterapkan dapat lebih efektif dalam mencapai tujuan kelestarian lingkungan dan memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat.

5. KESIMPULAN

Dari evaluasi kebijakan lingkungan yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa efektivitas kebijakan dalam mencapai tujuan kelestarian lingkungan sangat bergantung pada beberapa faktor kunci. Kebijakan yang berbasis insentif ekonomi, seperti pajak karbon dan subsidi energi terbarukan, menunjukkan dampak positif yang signifikan dalam mengurangi emisi dan mendorong adopsi teknologi bersih. Namun, tantangan dalam implementasi, seperti kurangnya dukungan politik, sumber daya yang terbatas, dan resistensi masyarakat, dapat menghambat keberhasilan kebijakan tersebut. Selain itu, kolaborasi antar-pemangku kepentingan dan penyesuaian kebijakan terhadap kondisi lokal juga menjadi faktor penting dalam mencapai hasil yang diinginkan.

6. SARAN

1. Memperkuat Dukungan Politik: Pembuat kebijakan perlu meningkatkan dukungan politik untuk kebijakan lingkungan dengan melibatkan pemangku kepentingan dan masyarakat dalam proses perumusan kebijakan.
2. Meningkatkan Sumber Daya: Diperlukan investasi yang lebih besar dalam infrastruktur dan sumber daya untuk mendukung implementasi kebijakan, termasuk fasilitas daur ulang dan pengelolaan limbah yang efektif.
3. Meningkatkan Kesadaran Masyarakat: Program edukasi dan kampanye kesadaran masyarakat harus dilakukan untuk meningkatkan pemahaman dan dukungan terhadap kebijakan lingkungan.

Dengan mengadopsi saran-saran ini, diharapkan kebijakan lingkungan yang diterapkan dapat lebih efektif dalam mencapai tujuan kelestarian lingkungan dan memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Butarbutar, A. R., Farida, D., Dewi, L. P., Sitopu, J. W., Uhai, S., Jayadi, A., & Mutmainnah, I. (2024). Evaluasi dampak pariwisata terhadap kesehatan lingkungan dan upaya pengelolaan resiko. *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran*, 7, 4947–4954.

Dunn, W. N. (2018). *Public policy analysis: An integrated approach* (6th ed.). Routledge.

- Hardani, H., Andriani, H., Ustiawaty, J., Utami, E. F., Istiqomah, R. R., Fardani, R. A., Sukmana, D. J., & Auliya, N. H. (2020). *Metode penelitian kualitatif & kuantitatif* (H. Abadi, Ed.). Pustaka Ilmu.
- Purba, B., Situmorang, E. J. Y., Annurradi, M. A. S., Siagian, H., & Hutagalung, M. (2024). Kebijakan pemerintah dalam pengelolaan sumber daya alam: Studi kasus Indonesia. *Economic Reviews Journal*, 3(3). <https://doi.org/10.56709/mrj.v3i3.316>
- Santosa, T. A. (n.d.). *Evaluasi kebijakan pengendalian sampah plastik terhadap kelestarian lingkungan hidup di Kota Semarang*.
- Siti Khadijah Hidayat, Sri Sundari, & Pakpahan, M. (2024). Evaluasi kebijakan pengelolaan sumber daya alam di Indonesia: Tantangan dan peluang untuk masa depan. *Jurnal Manuhara: Pusat Penelitian Ilmu Manajemen dan Bisnis*, 2(2), 104–117.